

ASPIRASI PUBLIK TERKAIT UNDANG- UNDANG PEMILIHAN UMUM DAN PILKADA

Temuan Survei Nasional:
1 – 3 Februari 2021

The logo for INDIKATOR features the word "INDIKATOR" in a bold, black, sans-serif font. The letter "O" is replaced by a stylized circular graphic containing a teal and red design. Above the logo is a thick red horizontal bar with a diagonal cutout on the right side. Below the logo is another thick red horizontal bar with a diagonal cutout on the left side.

INDIKATOR

Jl. Cisadane No. 8, Menteng – Jakarta Pusat
Telp: (021) 31927996/98, Fax: (021) 3143867
Website: www.indikator.co.id

LATAR BELAKANG

- Setiap akan menyelenggarakan pemilihan umum, biasa dilakukan evaluasi terhadap undang-undang pemilihan umum. Menjelang pemilihan umum 2024 aspirasi untuk melakukan evaluasi dan melakukan perubahan terhadap Undang-undang pemilihan umum juga sudah muncul.
- Di Komisi II DPR RI yang membidangi masalah ini, sudah diusulkan dan dibahas bagi kemungkinan “perbaikan” UU untuk pemilu 2024 nanti.
- Dalam konteks UU pemilihan umum tersebut yang krusial adalah: Pertama, sejauh mana pemilihan presiden tetap dilakukan menurut asas pemilihan langsung oleh rakyat atau lewat wakil-wakil rakyat di MPR (anggota DPR dan DPD). Isu ini penting karena masih ada aspirasi agar presiden dipilih oleh MPR meskipun hal itu menuntut amandemen UUD 1945.

LATAR BELAKANG

- Kedua, aspirasi yang menghendaki agar sistem pemilihan anggota DPR/DPRD dirubah dari sistem proporsional daftar calon terbuka sebagaimana berlaku sekarang menjadi sistem proporsional daftar calon tertutup. Perbedaan dasar kedua varian sistem proporsional ini adalah bahwa dalam sistem proporsional daftar terbuka nomor urut calon tidak mutlak menentukan kemenangan kursi dari satu partai di daerah pemilihan. Yang lebih menentukan dalam perolehan kursi dan mewakili partai di sebuah Dapil adalah perolehan suara terbanyak oleh seorang calon berapapun nomor urutnya. Sementara dalam sistem proporsional dengan daftar calon tertutup nomor urut calon menentukan kemenangan seorang calon bagi partai di sebuah daerah pemilihan tertentu, dan yang menentukan nomor urut adalah petinggi partai.

LATAR BELAKANG

- Ketiga, ada aspirasi untuk merubah terkait keserentakan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. Dalam UU yang sekarang pemilihan keduanya dilakukan serentak seperti dilakukan pada pemilu 2019. Berdasarkan evaluasi hasil pemilu 2019 muncul aspirasi agar pemilihan anggota legislatif dan presiden kembali dipisah waktu pelaksanaannya. Salah satu pertimbangannya karena keserentakan tersebut membuat pelaksanaan pemilu kurang terlaksana dengan baik.
- Keempat, ada aspirasi agar Pilkada dalam 4 tahun ke depan tidak diserentakkan tahunnya dengan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden 2024 nanti. Pertimbangan utamanya adalah mencegah beban berat dalam pelaksanaan pemilu ataupun Pilkada. Pemilu serentak 2019 dinilai berat dilaksanakan apalagi ditambah dengan ratusan Pilkada di seluruh tanah air. Di samping itu, di antara kepala daerah ada yang habis masa jabannya pada 2022 dan 2023, maka kekosongan jabatan yang cukup lama itu akan diisi oleh PLT yang tidak punya mandat dari rakyat, dan membuka peluang bagi kekuasaan pusat memperlemah prinsip otonomi daerah dan demokrasi.

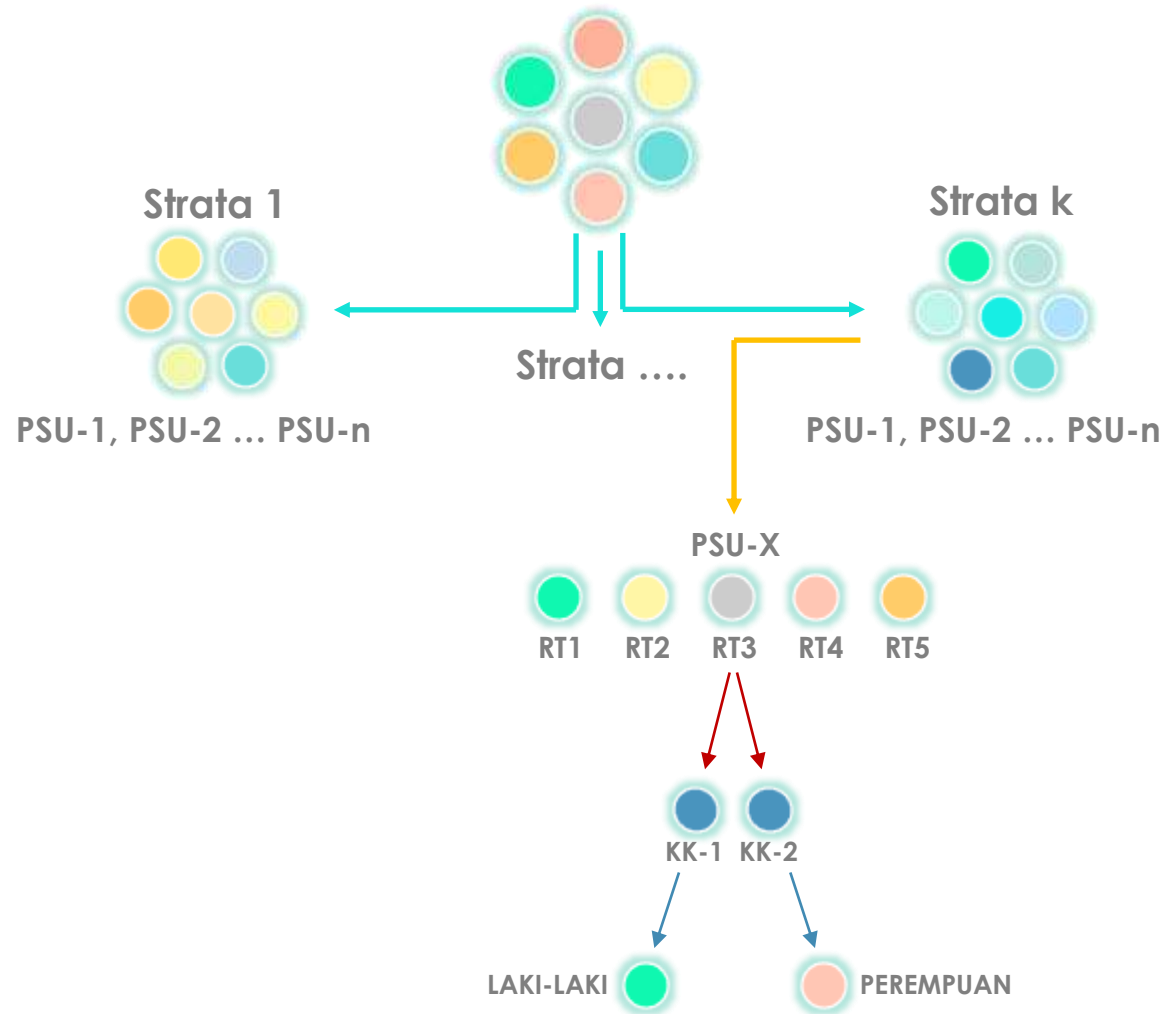
LATAR BELAKANG

- Akuntabilitas kebijakan publik seperti UU terkait pemilu menjadi sebuah ciri yang khas dalam demokrasi: Sejauh mana UU pemilu itu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik bahwa UU tersebut mencerminkan keinginan publik atau pemilih? Opsi-opsi mana terkait UU pemilu tersebut yang lebih mencerminkan aspirasi pemilih dan prinsip demokrasi?
- Apakah preferensi-preferensi elite partai di DPR mewakili pandangan pemilih mereka? Semakin pilihan elite partai mendekati aspirasi pemilih mereka maka pilihan elite tersebut semakin *accountable* kepada publik dan kepada pemilih.
- Untuk mengetahui akuntabilitas pada pemilih mengenai pilihan-pilihan terkait UU pemilu dilakukan survei opini publik atau pemilih secara nasional yang dilakukan pada 1-3 Februari 2021. Survei ini dilakukan dengan biaya CSR Indikator.

METODE

- Dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, sulit kita mengetahui secara cepat dinamika persepsi publik atas isu-isu mutakhir dengan mengandalkan survei tatap muka langsung dengan responden.
- Oleh karena itu, survei menggunakan kontak telpon kepada responden adalah cara yang paling mungkin dilakukan.
- Sampel sebanyak 1200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.
- Sebanyak 206.983 responden yang terdistribusi secara acak di seluruh nusantara pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam rentang 2 tahun terakhir. Secara rata-rata, sekitar 70% di antaranya memiliki nomor telpon. Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelpon sebanyak 7.604 data, dan yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yaitu sebanyak 1200 responden.
- Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (*margin of error--MoE*) sekitar $\pm 2.9\%$ pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

FLOWCHART PENARIKAN SAMPEL SURVEI TATAP MUKA



Populasi desa/kelurahan (PSU).

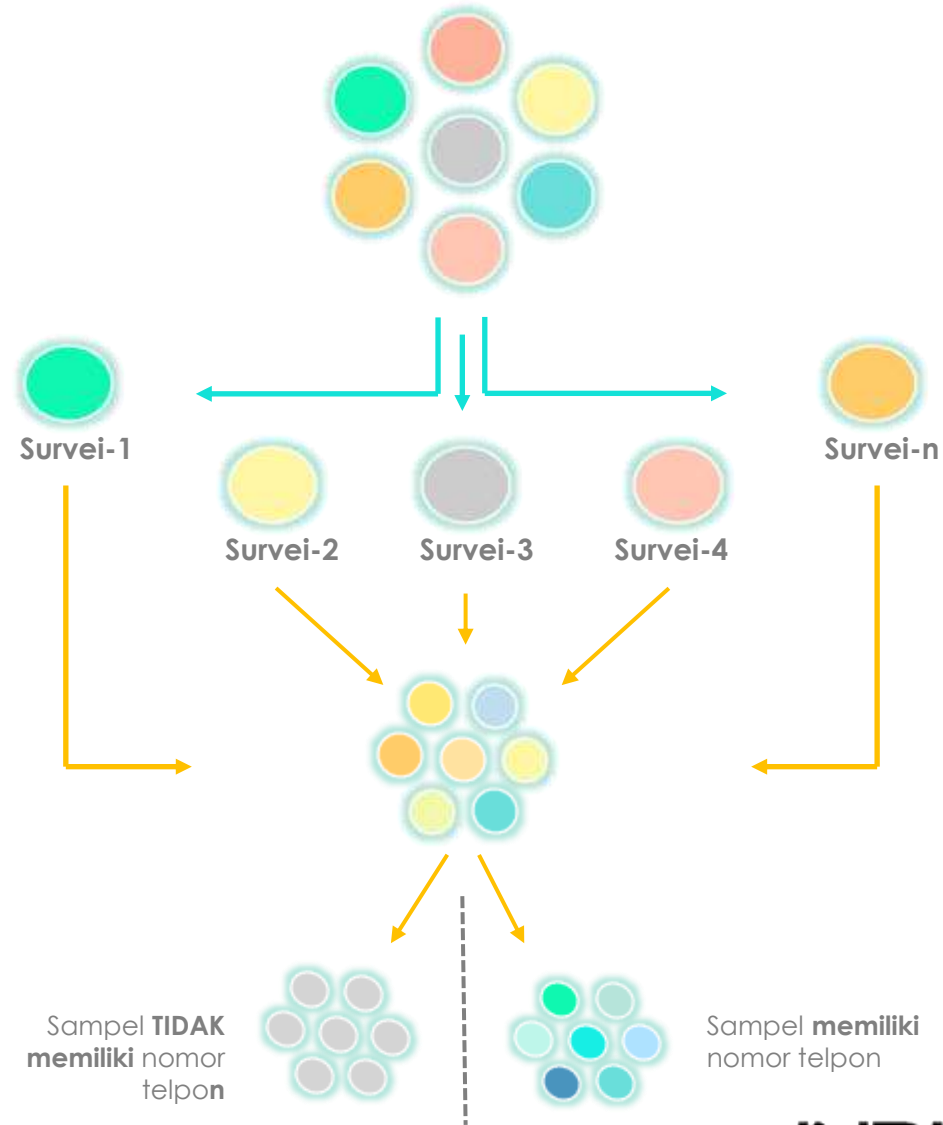
Desa/kelurahan (PSU) di tiap Strata dipilih secara random dengan jumlah proporsional.

Di setiap PSU terpilih, dipilih sebanyak 5 RT (satuan lingkungan terkecil di atas KK) dengan cara random.

Di masing-masing RT/Lingkungan terpilih, dipilih secara random dua KK.

Di tiap KK terpilih, dipilih secara random satu orang yang punya hak pilih, laki-laki/perempuan.

POPULASI, SAMPEL & SAMPEL FRAME SURVEI TELPON



Populasi Nasional.

Survei-survei yang dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung kepada responden.

Sampel gabungan dari seluruh survei yang dilakukan.

Sampel gabungan dipilah menjadi dua kelompok, kelompok yang memiliki nomor telpon kemudian diacak (*stratified random sampling*) untuk diwawancarai melalui kontak telpon.

INDIKATOR

TEMUAN: VALIDASI SAMPEL

PROFIL DEMOGRAFI: SAMPEL VS POPULASI

KATEGORI	POPULASI	SAMPEL
GENDER		
Laki-laki	50.3	50.1
Perempuan	49.7	49.9
DESA-KOTA		
Pedesaan	50.1	50.5
Perkotaan	49.9	49.5
USIA		
<= 21 tahun	12.7	12.0
22 - 25 tahun	10.1	9.8
26 - 40 tahun	37.0	37.0
41 - 55 tahun	25.0	25.4
> 55 tahun	15.2	15.8

KATEGORI	POPULASI	SAMPEL
AGAMA		
Islam	87.2	87.8
Lainnya	12.8	12.2
ETNIS		
Jawa	40.2	41.8
Sunda	15.5	15.2
Batak	3.6	2.8
Madura	3.0	3.4
Betawi	2.9	2.7
Minang	2.7	2.9
Bugis	2.7	2.6
Melayu	2.3	2.8
Lainnya	27.1	25.8

PROFIL DEMOGRAFI: SAMPEL VS POPULASI

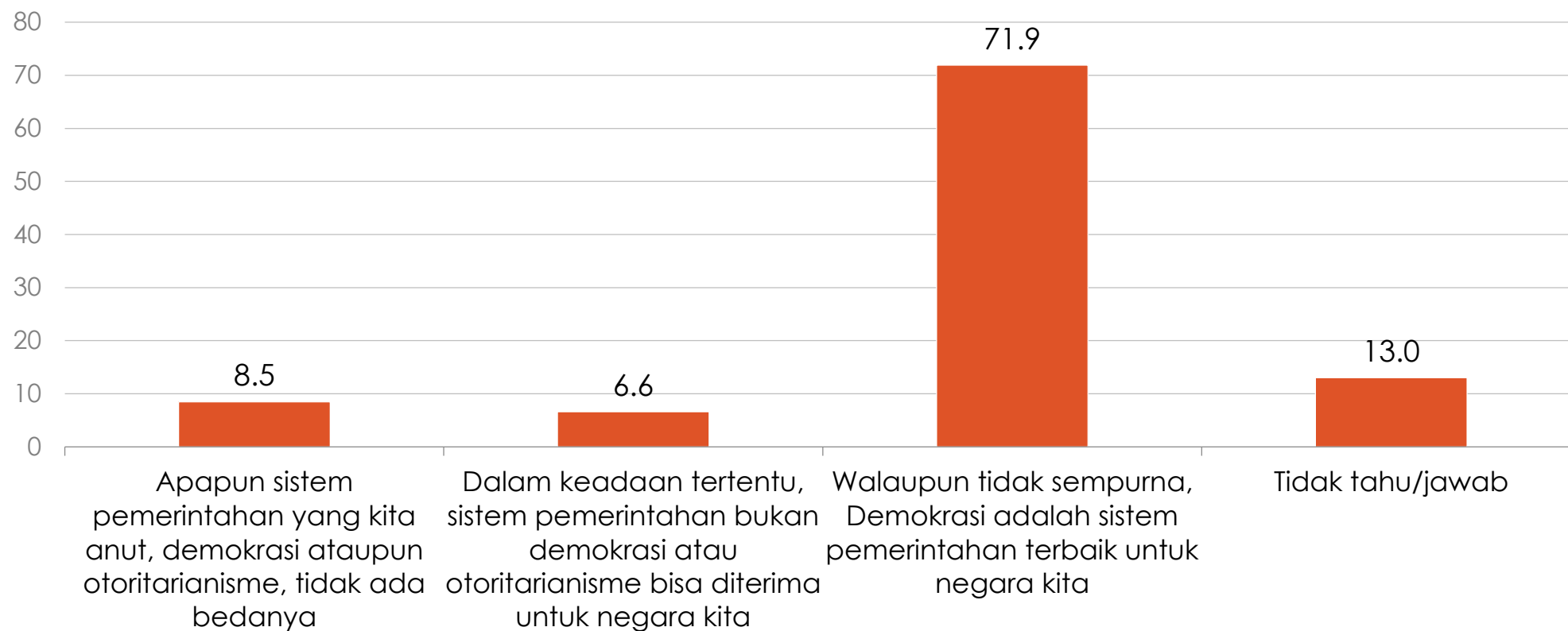
KATEGORI	POPULASI	SAMPEL
PROVINSI		
ACEH	1.8	1.8
SUMATERA UTARA	5.1	5.1
SUMATERA BARAT	1.9	1.9
RIAU	2.0	2.0
JAMBI	1.3	1.3
SUMATERA SELATAN	3.1	3.1
BENGKULU	0.7	0.7
LAMPUNG	3.2	3.2
KEP. BANGKA BELITUNG	0.5	0.5
KEP. RIAU	0.6	0.6
DKI JAKARTA	4.1	4.1
JAWA BARAT	17.4	17.4
JAWA TENGAH	14.6	14.6
D.I. YOGYAKARTA	1.4	1.4
JAWA TIMUR	16.2	16.2
BANTEN	4.3	4.3
BALI	1.6	1.6

KATEGORI	POPULASI	SAMPEL
PROVINSI		
NTB	1.9	1.9
NTT	1.8	1.8
KALIMANTAN BARAT	1.9	1.9
KALIMANTAN TENGAH	0.9	0.9
KALIMANTAN SELATAN	1.5	1.5
KALIMANTAN TIMUR	1.3	1.3
KALIMANTAN UTARA	0.2	0.2
SULAWESI UTARA	1.0	1.0
SULAWESI TENGAH	1.0	1.0
SULAWESI SELATAN	3.2	3.2
SULAWESI TENGGARA	0.9	0.9
GORONTALO	0.4	0.4
SULAWESI BARAT	0.5	0.5
MALUKU	0.7	0.7
MALUKU UTARA	0.4	0.4
PAPUA BARAT	0.4	0.4
PAPUA	1.9	1.9

DEMOKRASI DAN KINERJA PRESIDEN

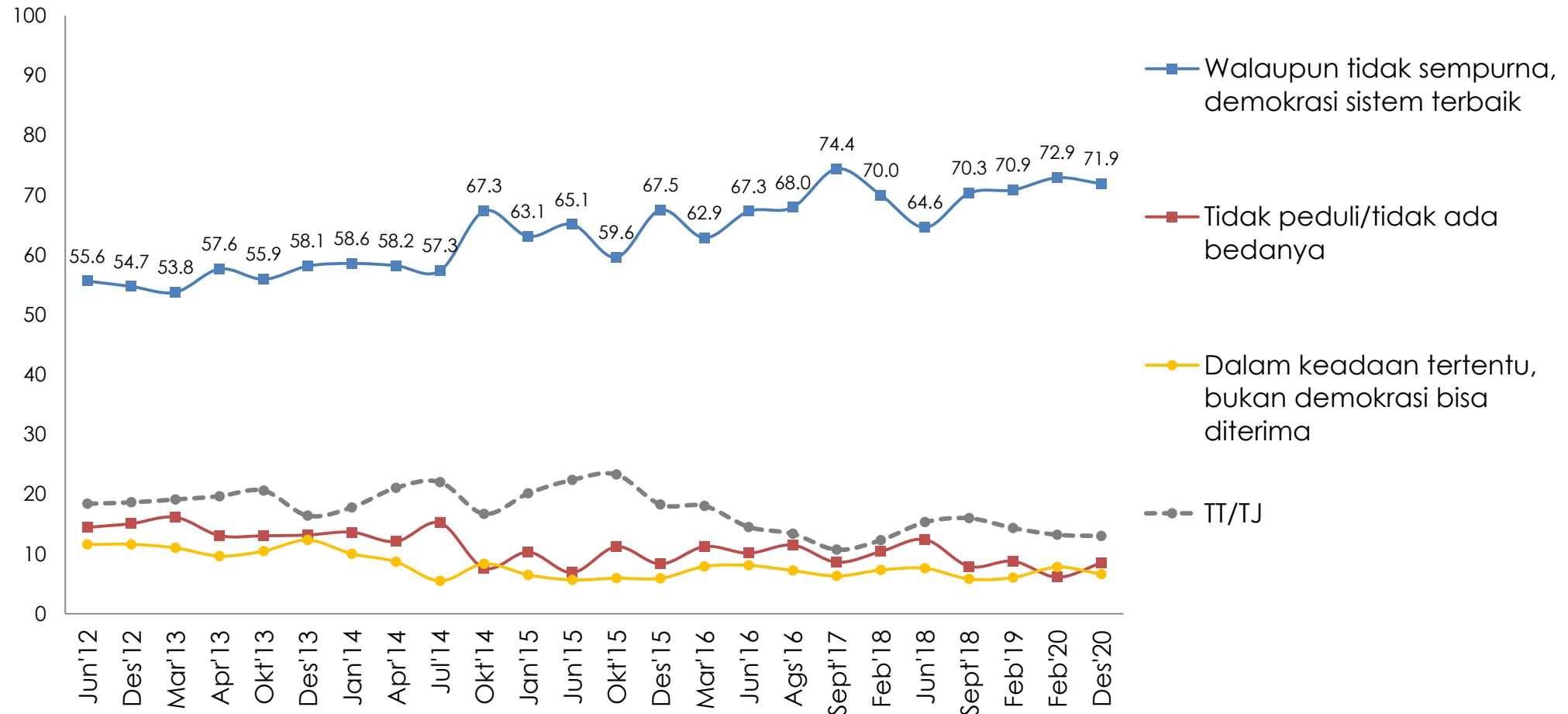
DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM PEMERINTAHAN

Di antara tiga pernyataan berikut ini, manakah yang paling sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak?... (%)



Sumber: LSI, Desember 2020

TREN DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM PEMERINTAHAN

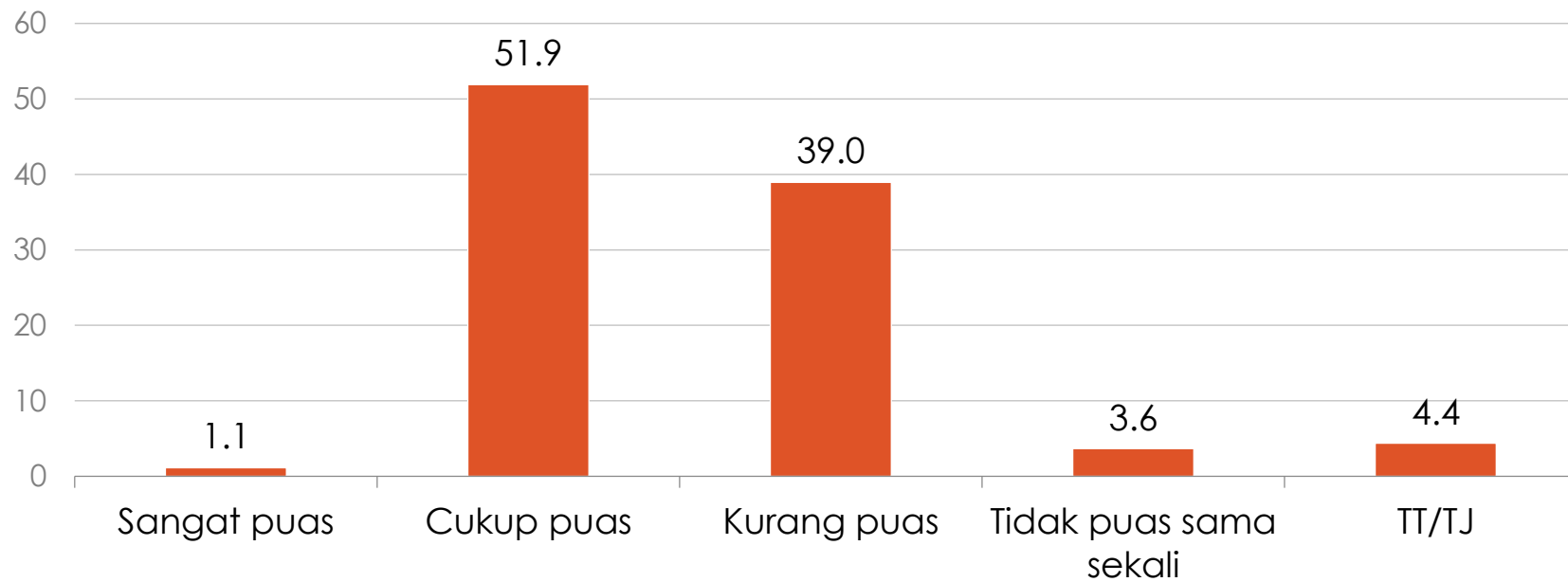


Sumber: Indikator, LSI, SMRC

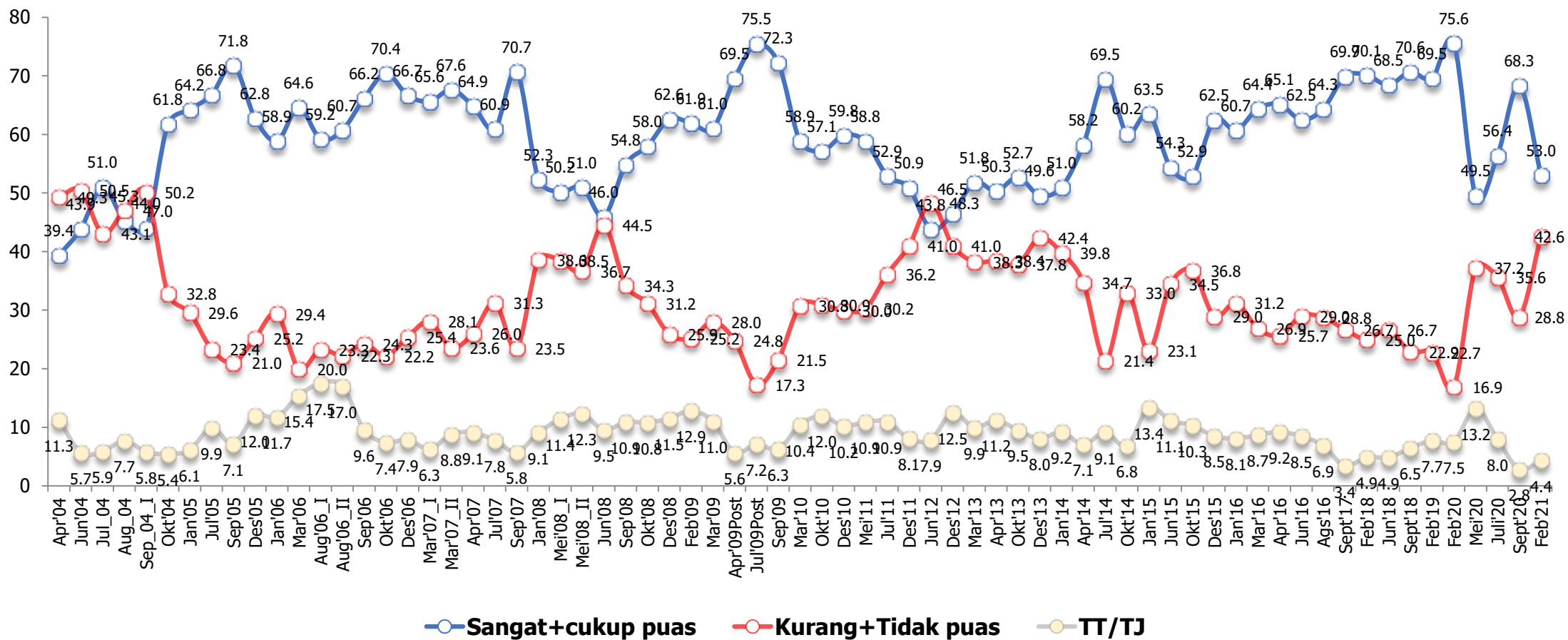


KINERJA DEMOKRASI

Seberapa puas atau tidak puaskah Ibu/Bapak terhadap pelaksanaan atau praktik demokrasi di negara kita sejauh ini?... (%)



TREN KEPUASAN ATAS KINERJA DEMOKRASI



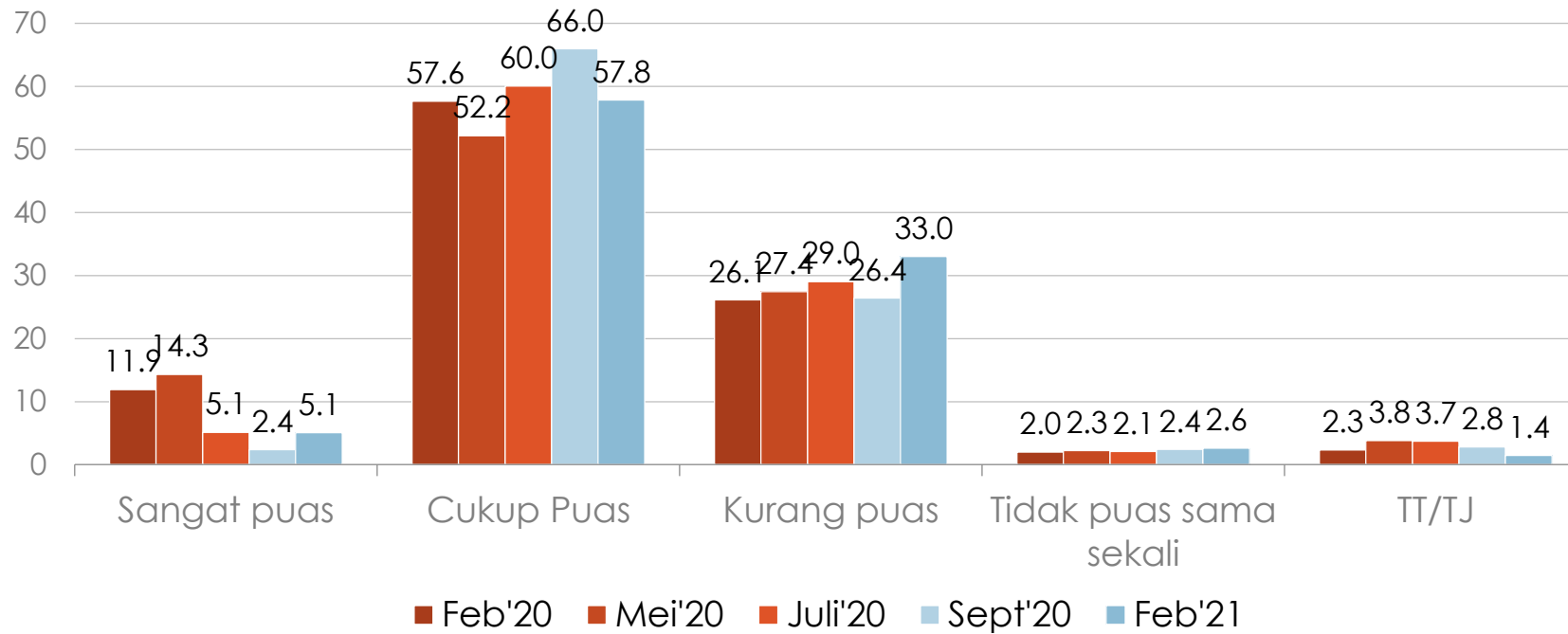
Sumber: Indikator, LSI, SMRC

Ada kenaikan tingkat ketidakpuasan dengan pelaksanaan demokrasi dalam setahun terakhir



KINERJA PRESIDEN

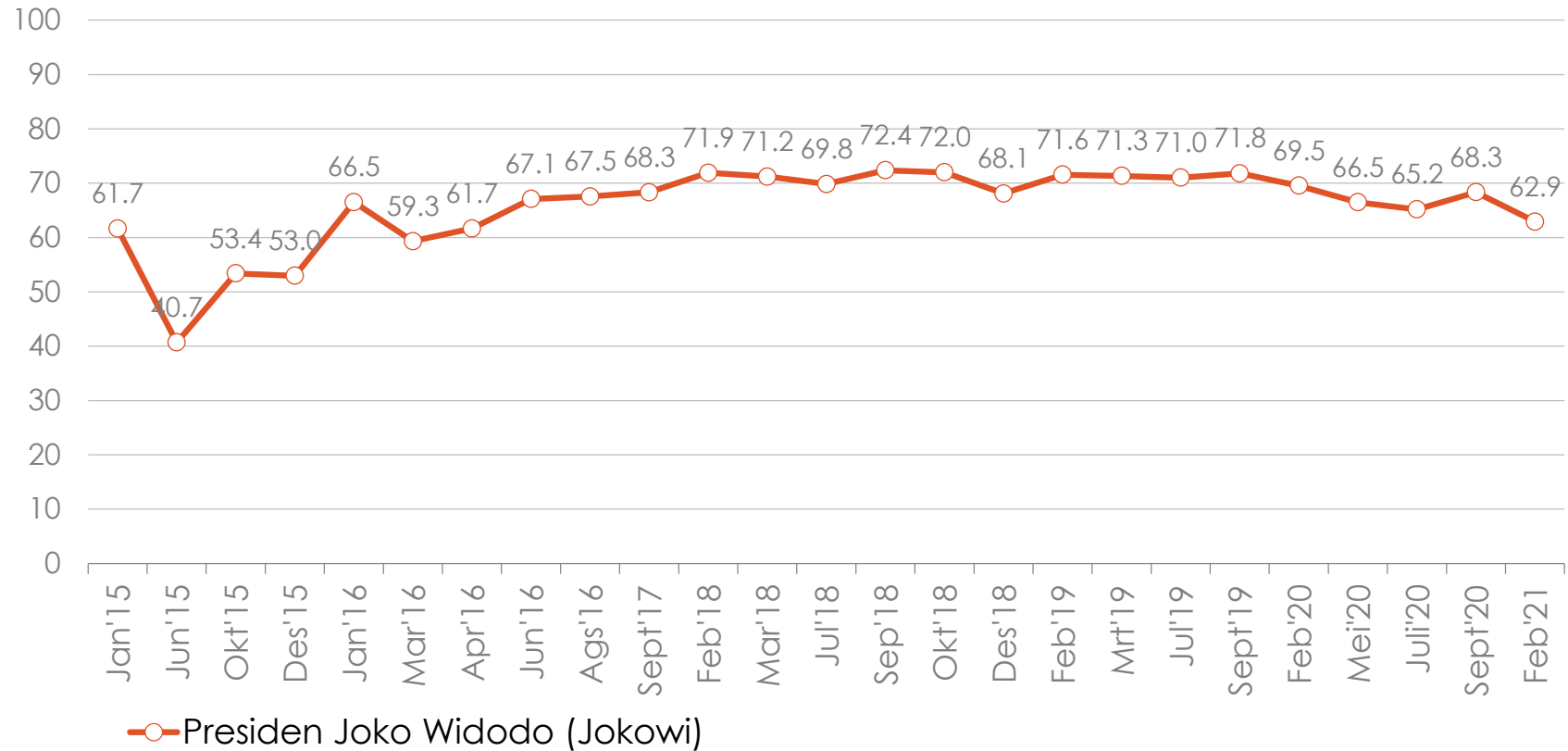
Secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas, atau tidak puas sama sekali dengan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ?... (%)



Mayoritas warga puas dengan kinerja Presiden, tapi dalam setahun terakhir ada kenaikan tingkat ketidakpuasan, dari 28% menjadi 35,6%.



TREN KEPUASAN TERHADAP KINERJA PRESIDEN



TEMUAN

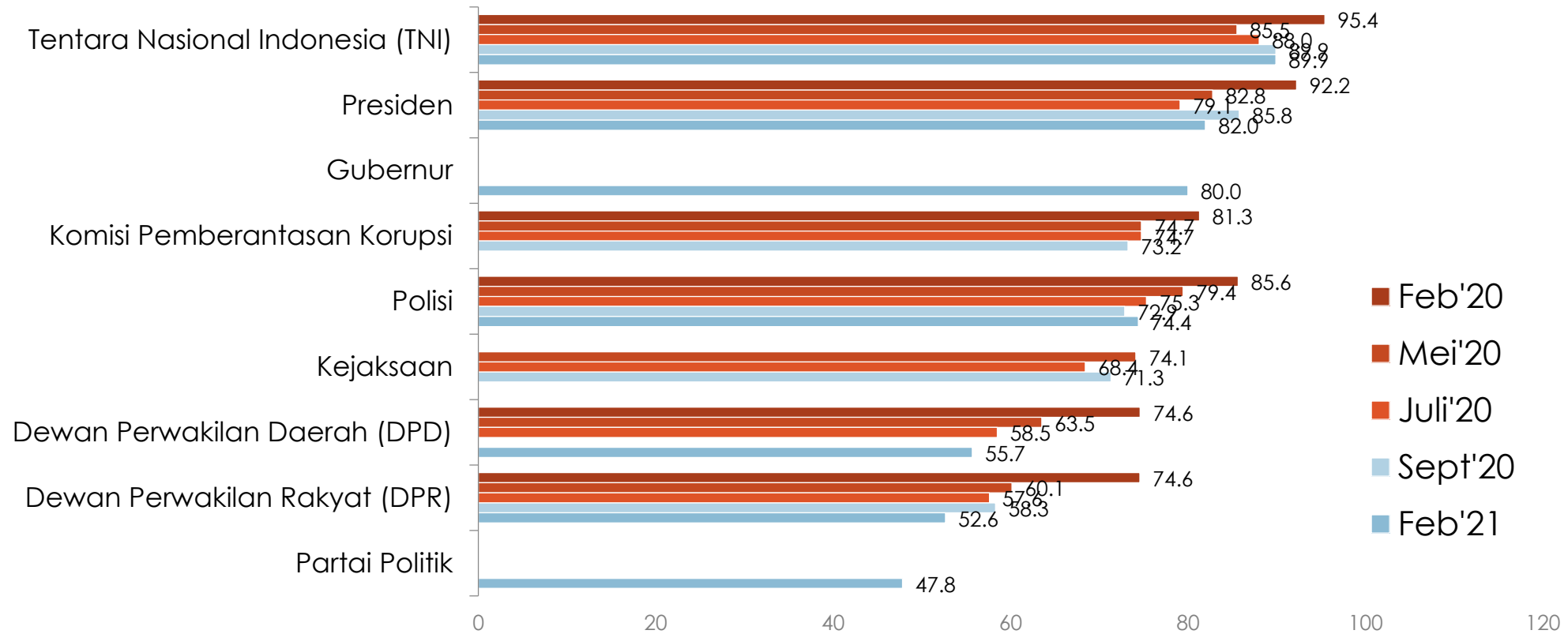
- Secara nasional 71,9% warga pada Desember 2020 memilih demokrasi sebagai sistem politik terbaik dibanding sistem lainnya. Angka ini konsisten dibanding survei-survei sebelumnya. Ini modal kultural publik untuk memperkuat atau membuat demokrasi stabil.
- Namun demikian, publik Indonesia kritis terhadap pelaksanaan demokrasi. Yang puas dengan pelaksanaan demokrasi tidak setinggi tingkat dukungan pada demokrasi itu sendiri sebagai sistem politik terbaik. Yang sangat puas atau cukup puas hanya 53%. Dalam setahun terakhir tingkat ketidakpuasan mengalami kenaikan tajam dari 16,9% pada Feb 2020 menjadi 42,6% pada Februari 2021
- Di mata pemilih kita punya persoalan dalam pelaksanaan demokrasi, bukan dengan demokrasinya sendiri, dan masalah ini semakin banyak warga yang merasakan.
- Tingkat kepuasan pada kinerja presiden masih tinggi (62,9%), namun dibanding setahun yang lalu (69,5%), tingkat kepuasan tersebut lebih rendah, atau terendah sejak selesai pemilihan umum 2019.

SENTIMEN TERHADAP PARTAI POLITIK

TRUST TERHADAP INSTITUSI

Tolong sebutkan tingkat kepercayaan Ibu/Bapak terhadap lembaga berikut: apakah Ibu/Bapak sangat percaya, cukup percaya, tidak percaya, atau tidak percaya sama sekali?... (%)

[sangat+cukup percaya]



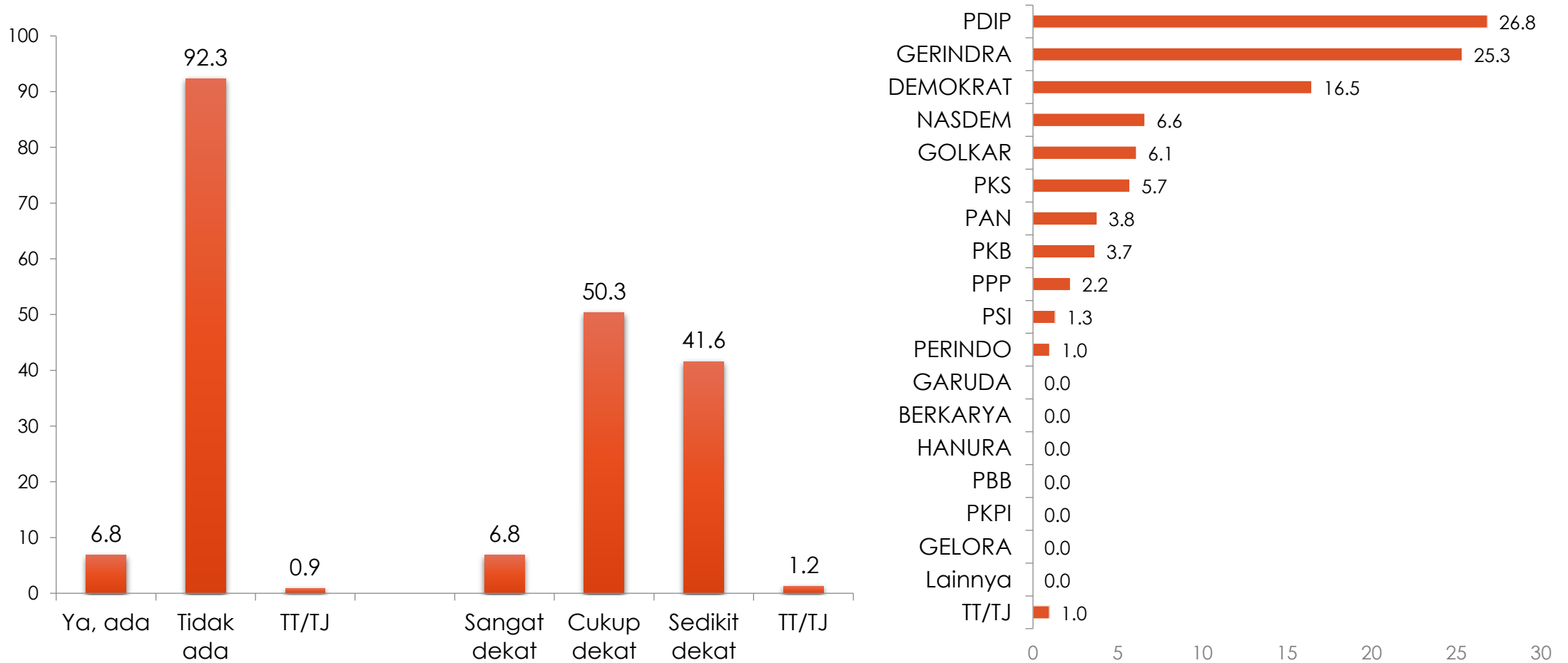
Trust pada partai politik (47,8%) kurang dari separuh warga, dan paling rendah dibanding sejumlah lembaga publik lainnya.

PARTY ID

Ada orang yang merasa lebih dekat pada partai politik tertentu dan ada yang tidak. Bagaimana dengan Ibu/Bapak sendiri, apakah ada partai politik yang Ibu/Bapak merasa lebih dekat terhadapnya? ... (%)

Kalau "YA, ada", sebutkan partai mana itu? ... (%)

Jika "Ya, ada", seberapa dekat Ibu/Bapak rasakan dengan partai tersebut?... (%)



TEMUAN

- Tingkat kepercayaan pada lembaga-lembaga politik/publik adalah ukuran stabilitas sebuah sistem politik termasuk demokrasi yang kita jalani sekarang.
- Secara umum publik percaya pada lembaga-lembaga publik seperti TNI, Presiden, KPK, Polri, Kejaksaan, DPD, DPR, dan gubernur. Tapi kepercayaan pada DPR adalah yang terendah dibanding yang lain, dan apalagi kepercayaan pada partai politik. Kurang dari 50% warga yang percaya pada partai politik. Partai tidak bisa menjadi modal politik untuk membuat sistem stabil kalau tingkat kepercayaan publik menjadi ukuran.
- Rendahnya kepercayaan pada partai ini lebih memprihatinkan lagi kalau dilihat dari tingkat ikatan psikologis pemilih dengan partai. Di survei terakhir hanya 6,8% warga secara nasional yang merasa dekat dengan partai tertentu. Fakta ini menjelaskan bahwa partai belum bisa dijadikan sandaran untuk membangun stabilitas politik.

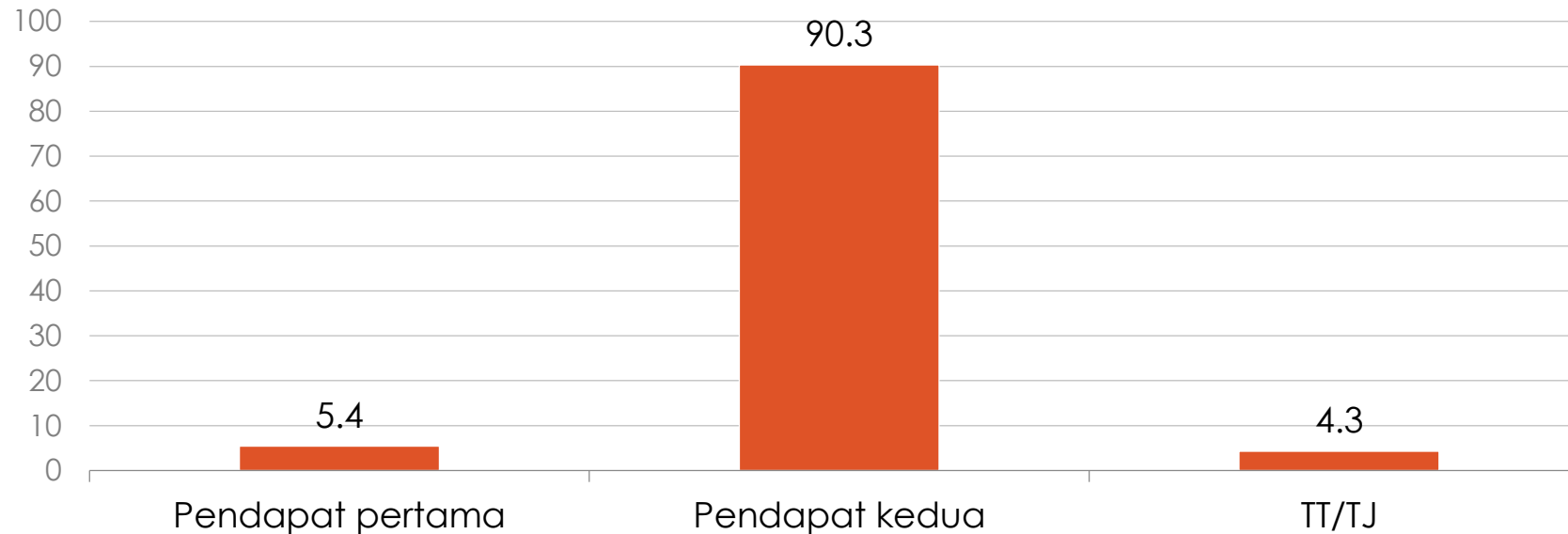
IDE-IDE TEKAIT UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM

PILPRES TIDAK LANGSUNG VS PILPRES LANGSUNG

Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekarang sedang dibahas Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam pembahasan tersebut ada dua pendapat berbeda mengenai hal-hal berikut ini. Pendapat mana yang Ibu/Bapak setuju?

Pendapat pertama: Presiden dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bukan dipilih langsung oleh rakyat

Pendapat kedua: Presiden dan wakil presiden seperti selama ini tetap dipilih langsung oleh rakyat



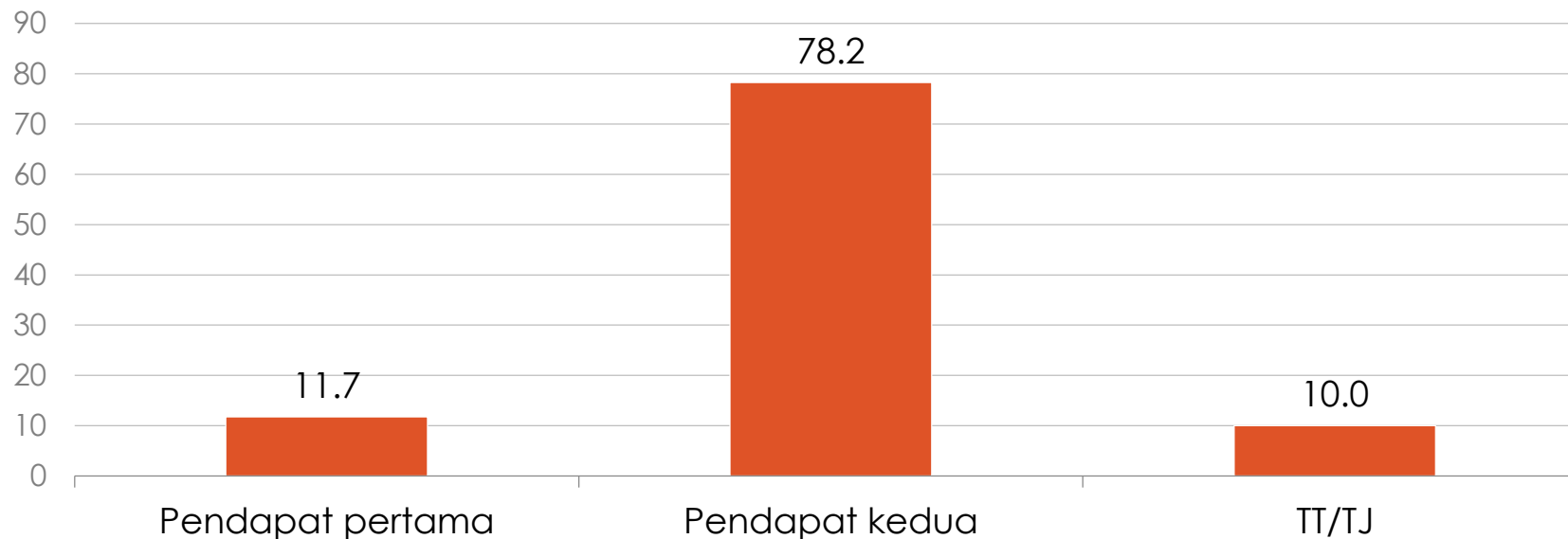
Hampir semua warga (90,3%) menginginkan agar pemilihan presiden tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat seperti sekarang, bukan oleh anggota MPR.

HANYA PILIH PARTAI VS PILIH PARTAI DAN CALON

Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekarang sedang dibahas Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam pembahasan tersebut ada dua pendapat berbeda mengenai hal-hal berikut ini. Pendapat mana yang Ibu/Bapak setuju?

Pendapat pertama: Dalam pemilihan umum, warga diminta hanya memilih partai. Calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pimpinan partai, bukan oleh pemilih langsung

Pendapat kedua: Dalam pemilihan umum, warga diminta memilih partai atau calon, dan calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pemilih secara langsung, bukan oleh pimpinan partai



Hampir semua warga (78,2%) ingin agar sistem pemilu proporsional daftar calon terbuka yang sekarang dianut dipertahankan.

DIWAKILI OLEH ANGGOTA DPR VS DIWAKILI OLEH PARTAI

Sebagai pemilih dalam pemilihan anggota DPR, apakah Ibu/Bapak lebih merasa diwakili oleh **orang** yang Ibu/Bapak pilih sebagai anggota DPR atau lebih merasa diwakili oleh **partai politik** asal anggota DPR tersebut? ... (%)



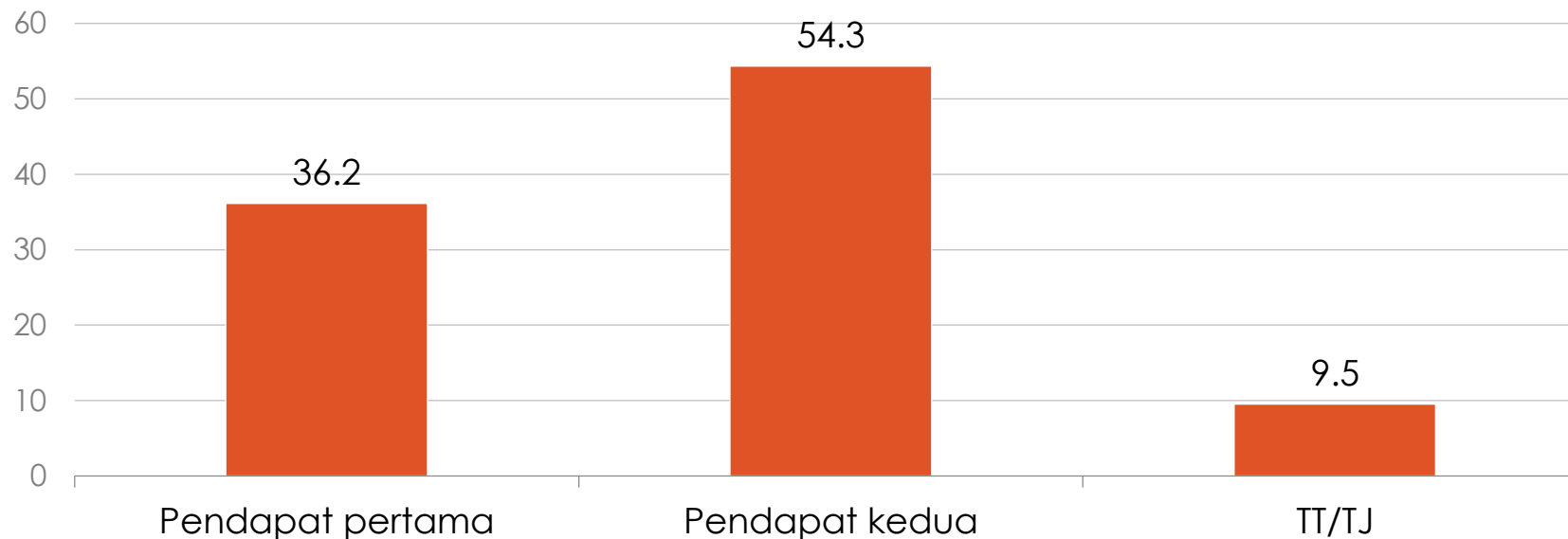
Lebih banyak pemilih yang merasa lebih diwakili anggota DPR (46%) daripada oleh partai politik (28,1%).

PILEG & PILPRES SERENTAK VS TIDAK SERENTAK

Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekarang sedang dibahas Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam pembahasan tersebut ada dua pendapat berbeda mengenai hal-hal berikut ini. Pendapat mana yang Ibu/Bapak setuju?

Pendapat pertama: Pemilihan anggota DPR dan pemilihan presiden dilakukan pada waktu bersamaan, baik tanggal, bulan maupun tahun

Pendapat kedua: Pemilihan anggota DPR dan pemilihan presiden dilakukan pada waktu berbeda tapi pada tahun yang sama



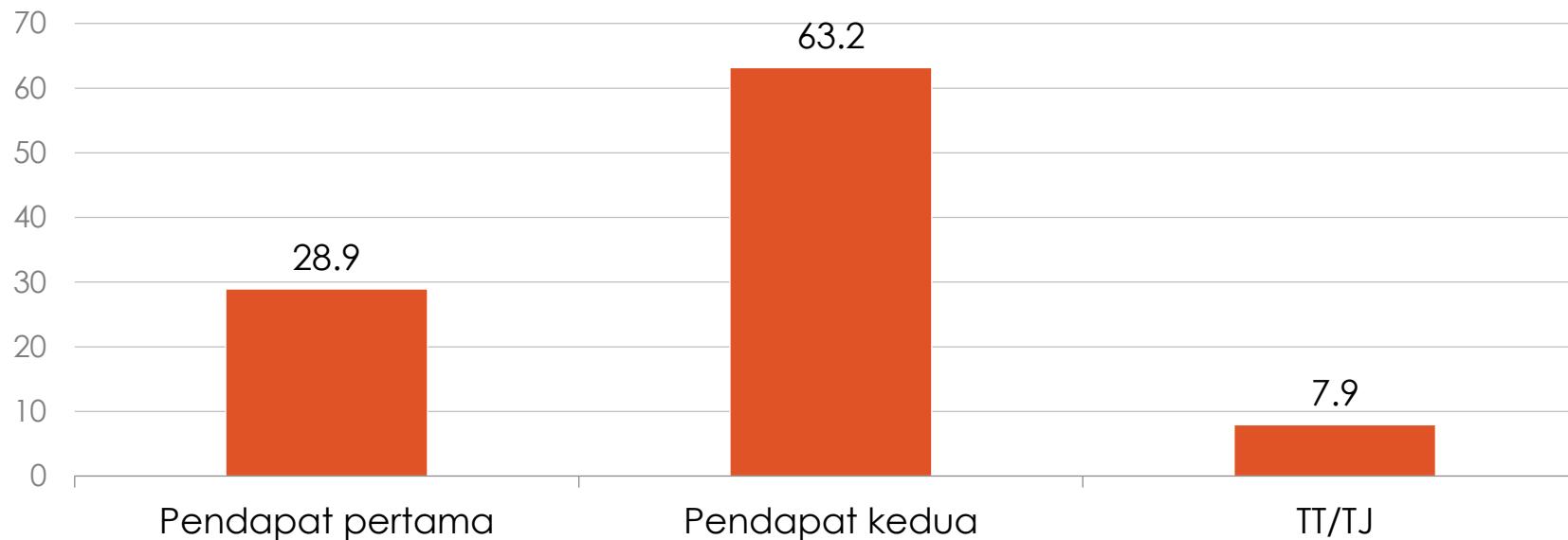
Umumnya warga (54,3%) menginginkan pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif dilakukan secara terpisah

PILEG, PILPRES & PILKADA SERENTAK VS TIDAK SERENTAK

Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekarang sedang dibahas Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam pembahasan tersebut ada dua pendapat berbeda mengenai hal-hal berikut ini. Pendapat mana yang Ibu/Bapak setuju?

Pendapat pertama: Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang akan datang dilakukan bersamaan waktunya dengan pemilihan anggota DPR dan pemilihan presiden

Pendapat kedua: Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan berbeda waktunya dengan pemilihan anggota DPR dan pemilihan presiden



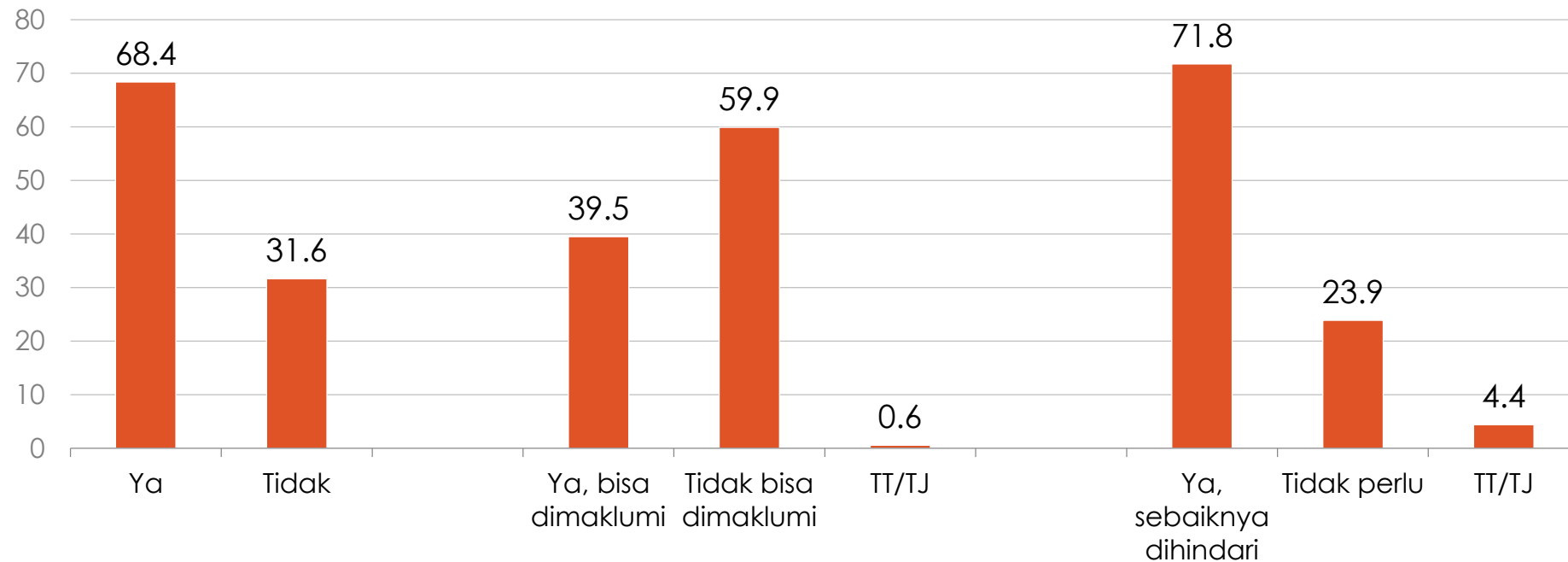
Warga umumnya (63,2%) menghendaki agar pemilihan presiden dan anggota legislatif dipisah waktunya dengan Pilkada

PENGALAMAN PEMILU SERENTAK 2019

Apakah Ibu/Bapak tahu bahwa pada pemilihan umum serentak 2019, memilih presiden dan juga memilih anggota DPR, banyak petugas pemilihan umum meninggal dunia karena beban kerja yang berat? ... (%)

Bila **ya**, apakah itu bisa dimaklumi atau tidak bisa dimaklumi? ... (%)

Bila **tidak bisa dimaklumi**, apakah sebaiknya pemilihan umum dan pemilihan presiden serentak itu dihindari? ... (%)



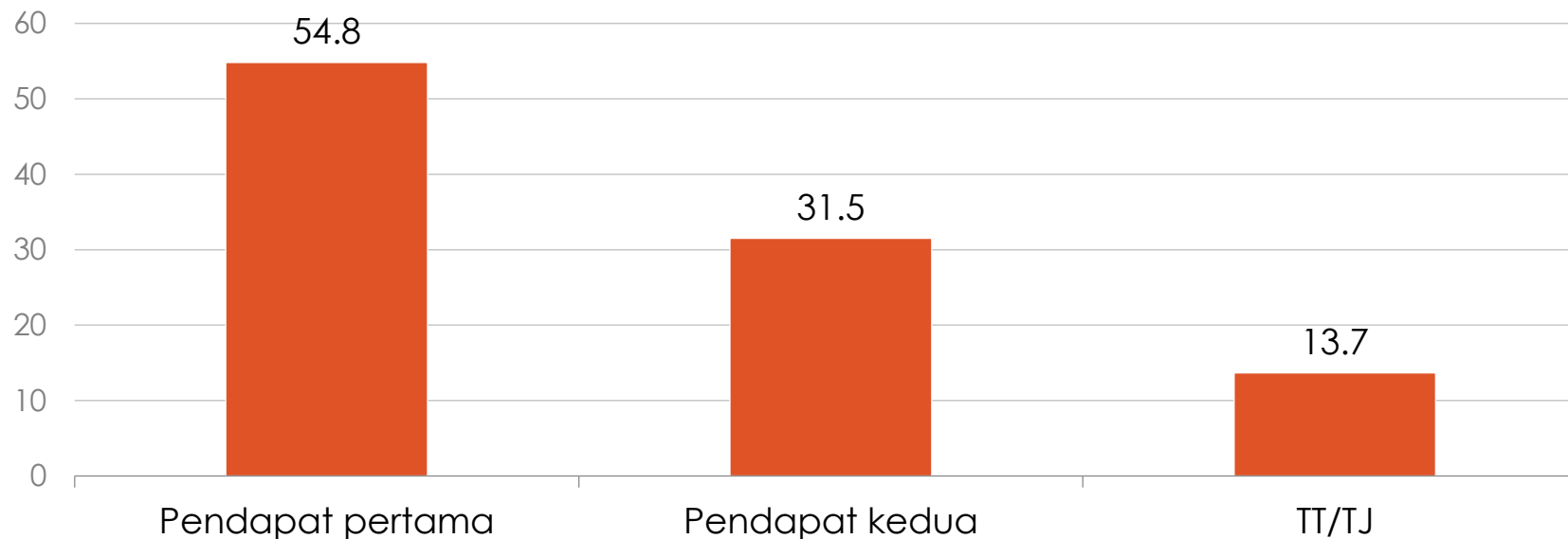
Warga yang tahu dengan banyaknya korban di pihak pelaksana pemilu 2019 umumnya tidak bisa menerima banyak korban tersebut (59,9%), dan dari mereka yang tak menerima tersebut 71,8% menginginkan agar penyatuan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dihindari

PILKADA 2022 VS PILKADA SERENTAK 2024

Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekarang sedang dibahas Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam pembahasan tersebut ada dua pendapat berbeda mengenai hal-hal berikut ini. Pendapat mana yang Ibu/Bapak setuju?

Pendapat pertama: Ada sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota akan habis masa tugasnya pada tahun 2022 dan karena itu pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota di daerah tersebut harus dilakukan sebelum masa tugas mereka berakhir pada tahun yang sama

Pendapat kedua: Ada sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota akan habis masa tugasnya pada tahun 2022 dan pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota di daerah tersebut harus dilakukan pada 2024 bersamaan dengan pemilihan anggota DPR dan pemilihan presiden. Untuk sementara gubernur, bupati, atau wali kota ditunjuk oleh pemerintah pusat, bukan dipilih rakyat langsung



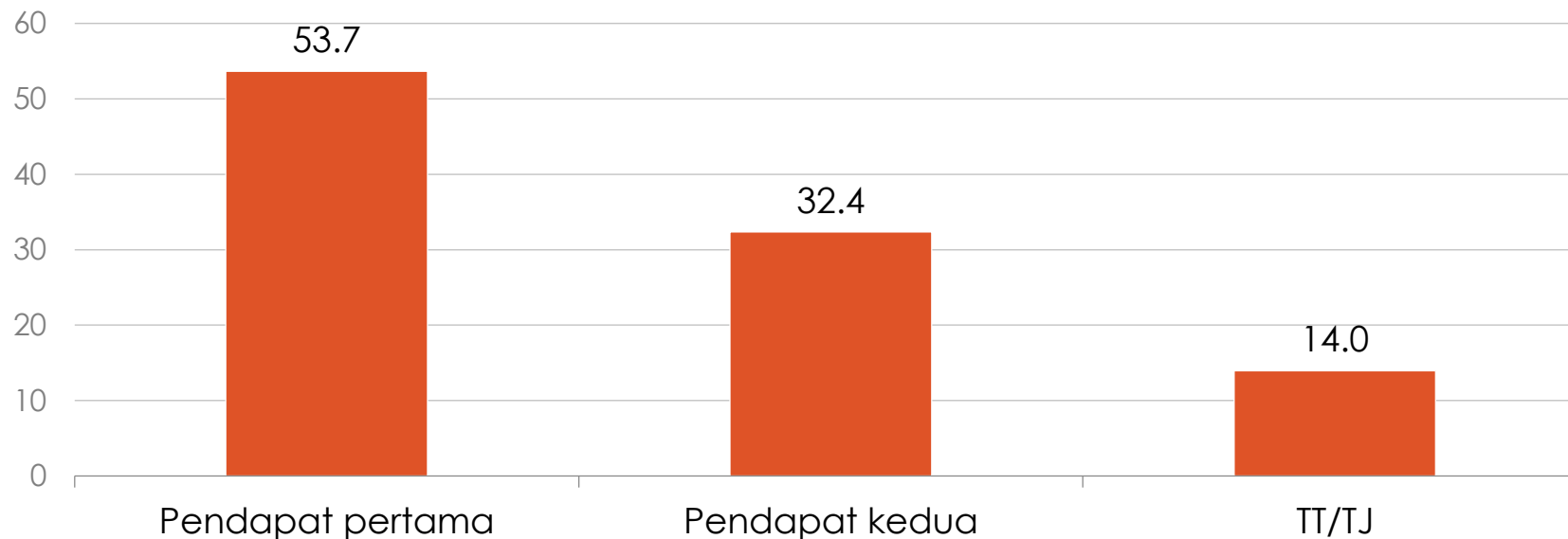
Umumnya warga (54,8%) menginginkan agar Pilkada dilakukan pada 2022 untuk daerah yang kepala daerahnya habis pada 2022

PILKADA 2023 VS PILKADA SERENTAK 2024

Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekarang sedang dibahas Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam pembahasan tersebut ada dua pendapat berbeda mengenai hal-hal berikut ini. Pendapat mana yang Ibu/Bapak setuju?

Pendapat pertama: Ada sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota akan habis masa tugasnya pada tahun 2023 dan karena itu pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota di daerah tersebut harus dilakukan sebelum masa tugas mereka berakhir pada tahun yang sama

Pendapat kedua: Ada sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota akan habis masa tugasnya pada tahun 2023 dan pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota di daerah tersebut harus dilakukan pada 2024 bersamaan dengan pemilihan anggota DPR dan pemilihan presiden. Untuk sementara gubernur, bupati, atau wali kota ditunjuk oleh pemerintah pusat, bukan dipilih rakyat langsung



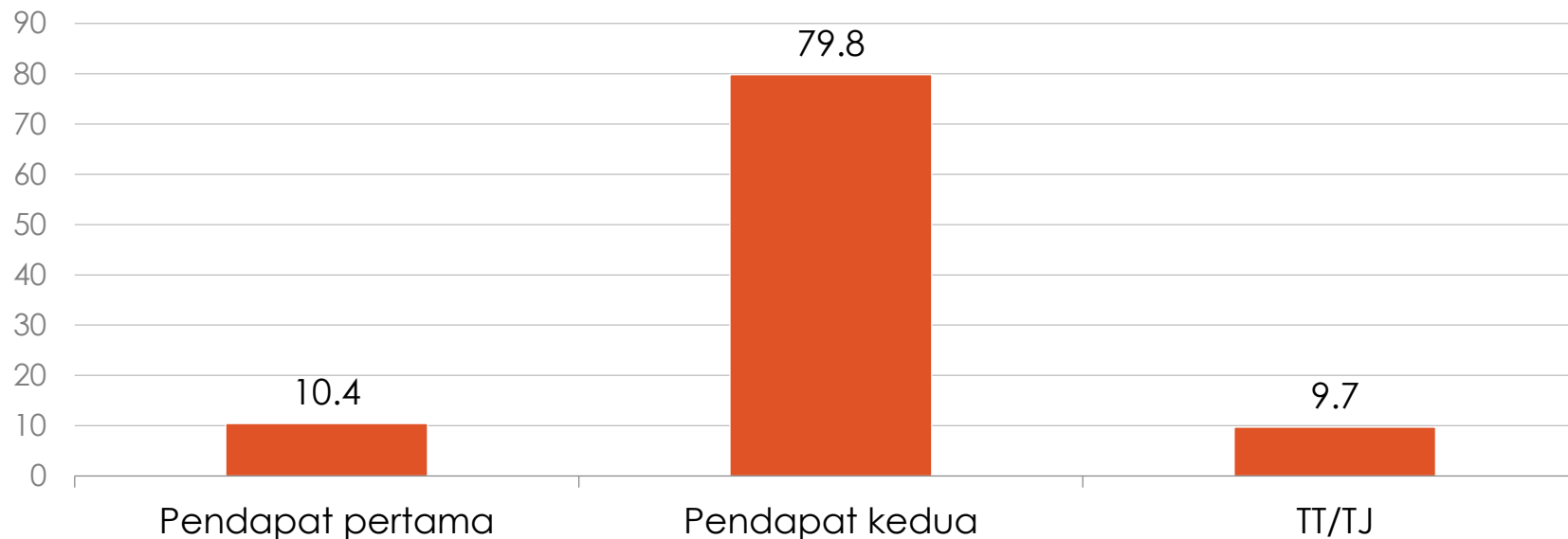
Umumnya warga (53,7%) menginginkan agar Pilkada diadakan pada 2023 yang kepala daerahnya habis masa jabatannya pada 2023

ANGGOTA KPU DARI PARTAI VS ANGGOTA KPU INDEPENDEN

Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekarang sedang dibahas Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam pembahasan tersebut ada dua pendapat berbeda mengenai hal-hal berikut ini. Pendapat mana yang Ibu/Bapak setuju?

Pendapat pertama: Partai politik sebagai peserta pemilu juga menjadi penyelenggara pemilu sehingga anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah orang-orang dari partai politik

Pendapat kedua: Partai politik tetap sebagai peserta pemilu sedangkan penyelenggara pemilu adalah KPU yang anggotanya adalah orang-orang independen (bukan orang partai) yang dipilih pemerintah dan DPR seperti selama ini



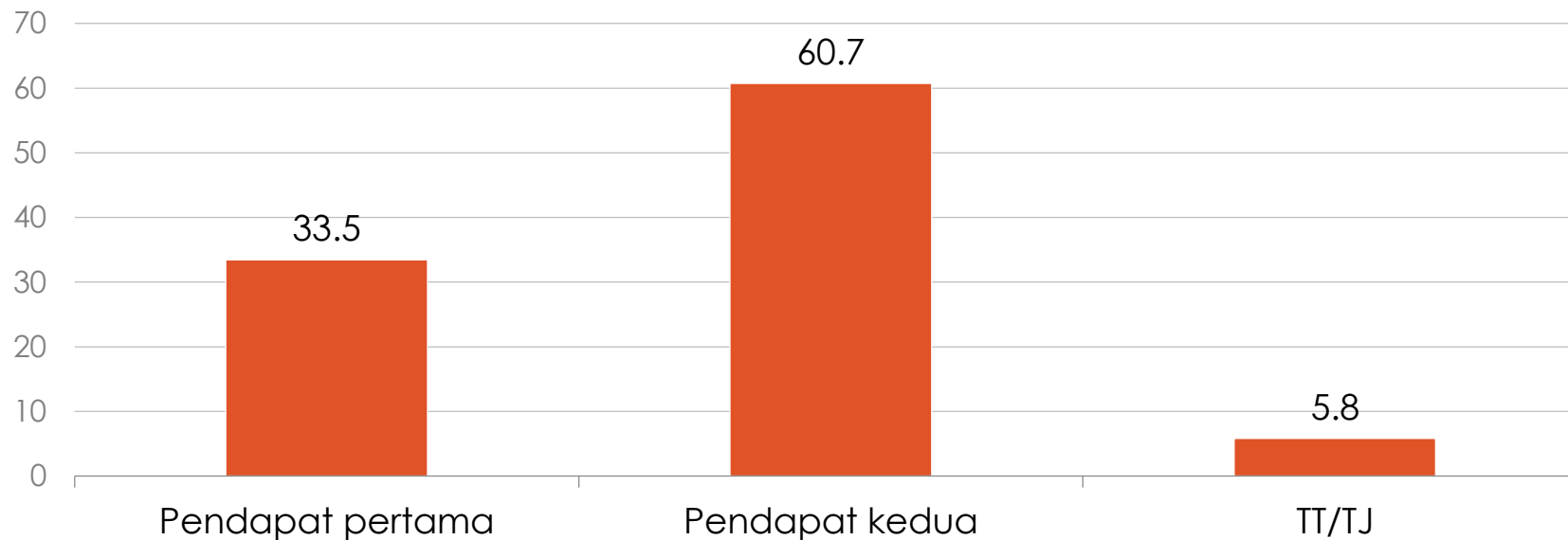
Hampir semua warga (79,8%) menghendaki agar anggota KPU bukan berasal dari partai politik, seperti sekarang

PILPRES 2 PASANGAN VS LEBIH DARI 2 PASANGAN

Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekarang sedang dibahas Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam pembahasan tersebut ada dua pendapat berbeda mengenai hal-hal berikut ini. Pendapat mana yang Ibu/Bapak setuju?

Pendapat pertama: Pasangan calon presiden-wakil presiden sebaiknya dua pasang saja supaya lebih sederhana

Pendapat kedua: Pasangan calon presiden-wakil presiden sebaiknya lebih dari dua pasang untuk menjaring secara lebih terbuka putra-putri terbaik menurut pilihan rakyat



Warga umumnya (60,7%) menginginkan agar ada lebih dari dua pasangan calon dalam pemilihan presiden

TEMUAN

- Aspirasi rakyat yang mengendaki agar pemilihan presiden tetap langsung oleh rakyat sangat tinggi. Hampir semua warga menginginkan demikian (90,3%). Yang punya pandangan agar presiden dipilih anggota MPR tidak punya dasar pada rakyat.
- Warga pada umumnya (78,2%) menginginkan agar sistem pemilihan umum dengan sistem proporsional daftar calon terbuka sebagaimana diatur dalam UU sekarang, tetap dipertahankan.
- Jauh lebih banyak warga yang merasa diwakili oleh anggota DPR (46%) dibanding oleh partai politik (28,1%). Karena itu partai tidak bisa mereduksi keterwakilan rakyat sesuai dengan keinginan partai tanpa mempertimbangan hubungan unik antara pemilih dan calon.
- Ini konsisten dengan kehendak rakyat agar tetap diberlakukan sistem proporsional daftar calon terbuka, dan tingkat kepercayaan dan ikatan psikologis pemilih yang rendah pada partai politik.

TEMUAN

- Warga umumnya mengendaki agar bercermin pada pelaksanaan pemilu 2019. Rakyat tidak menerima banyak korban dari pihak pelaksana pemilu serentak 2019 (59,9%). Pemilih berharap pemilu serentak seperti 2019 tidak kembali diulang (71,8%).
- Karena itu publik juga secara umum tidak setuju pemilu legislatif dan pilpres dilakukan bersamaan tahunnya dengan Pilkada serentak pada 2024 (63,2%).
- Secara lebih spesifik mayoritas publik menginginkan Pilkada 2022 (54,8%) dan 2023 (53,7%) ketika kepala daerah terkait selesai masa tugasnya, dan tidak setuju diganti PLT yang ditunjuk oleh pemerintah pusat.

TEMUAN

- Dua kali pemilihan presiden jumlah pasangan calon sama, hanya dua pasangan. Untuk membuka peluang rekrutmen pemimpin nasional secara lebih terbuka bagi munculnya calon terbaik dari masyarakat maka publik menghendaki agar pasangan calon lebih dari dua pasang, (60,7%). Ini mengindikasikan agar sistem pencalonan presiden dibuat sedemikian agar lebih membuka peluang bagi calon yang lebih banyak. Bentuknya mungkin syarat pencalonan presiden oleh partai dengan persentase kekuatan partai lebih rendah dari yang sekarang (20% dari total kursi di DPR).
- Publik juga menolak aspirasi yang berkembang agar partai politik menjadi pelaksana pemilihan umum (79,8%). Publik menghendaki agar pelaksana pemilu adalah KPU yang isinya orang-orang independen, bukan dari partai politik.

ANALISIS

PILPRES TIDAK LANGSUNG VS PILPRES LANGSUNG MENURUT BASIS PARTAI

Pendapat pertama: Presiden dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bukan dipilih langsung oleh rakyat

Pendapat kedua: Presiden dan wakil presiden seperti selama ini tetap dipilih langsung oleh rakyat

	BASE	Pendapat pertama	Pendapat kedua	TT/TJ
BASIS PARTAI 2019				
PKB	9.7	8.5	87.2	4.3
Gerindra	12.6	6.9	92.1	1.0
PDIP	19.3	4.5	91.8	3.7
Golkar	12.3	6.0	92.8	1.2
NasDem	9.0	6.1	93.9	0.0
PKS	8.2	4.6	89.2	6.2
PPP	4.5	0.0	100.0	0.0
PAN	6.8	0.0	92.9	7.1
Demokrat	7.8	4.5	94.0	1.5
Lainnya	9.7	9.1	90.9	0.0

	BASE	Pendapat pertama	Pendapat kedua	TT/TJ
KEPUASAN ATAS KINERJA PRESIDEN				
Puas	62.9	3.7	92.1	4.2
Kurang puas	35.6	8.5	87.6	3.9
TT/TJ	1.4	3.5	79.7	16.8

Pemilih partai manapun hampir semuanya menghendaki pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, bukan oleh anggota MPR

HANYA PILIH PARTAI VS PILIH PARTAI DAN CALON MENURUT BASIS PARTAI

Pendapat pertama: Dalam pemilihan umum, warga diminta hanya memilih partai. Calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pimpinan partai, bukan oleh pemilih langsung

Pendapat kedua: Dalam pemilihan umum, warga diminta memilih partai atau calon, dan calon anggota DPR yang mewakili partai tersebut ditentukan oleh pemilih secara langsung, bukan oleh pimpinan partai

	BASE	Pendapat pertama	Pendapat kedua	TT/TJ
BASIS PARTAI 2019				
PKB	9.7	12.8	83.0	4.3
Gerindra	12.6	11.8	81.8	6.4
PDIP	19.3	12.4	79.2	8.5
Golkar	12.3	12.0	75.9	12.0
NasDem	9.0	3.0	93.9	3.0
PKS	8.2	15.4	80.0	4.6
PPP	4.5	16.7	83.3	0.0
PAN	6.8	14.3	71.4	14.3
Demokrat	7.8	19.4	77.6	3.0
Lainnya	9.7	25.5	74.5	0.0

	BASE	Pendapat pertama	Pendapat kedua	TT/TJ
KEPUASAN ATAS KINERJA PRESIDEN				
Puas	62.9	11.7	77.9	10.3
Kurang puas	35.6	12.3	79.3	8.4
TT/TJ	1.4	0.0	63.5	36.5

Dukungan pada sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka seperti sekarang didukung oleh mayoritas pemilih di semua partai. Artinya ini merupakan aspirasi pemilih lintas partai. Juga ditemukan pada warga baik yang puas atau tidak puas pada kinerja presiden

DIWAKILI OLEH ANGGOTA DPR VS DIWAKILI OLEH PARTAI MENURUT BASIS PARTAI

Sebagai pemilih dalam pemilihan anggota DPR, apakah Ibu/Bapak lebih merasa diwakili oleh **orang** yang Ibu/Bapak pilih sebagai anggota DPR atau lebih merasa diwakili oleh **partai politik** asal anggota DPR tersebut? ... (%)

	BASE	Oleh anggota DPR	Oleh partai politik	TT/TJ
BASIS PARTAI 2019				
PKB	9.7	55.3	21.3	23.4
Gerindra	12.6	44.8	37.4	17.7
PDIP	19.3	49.0	23.1	27.9
Golkar	12.3	47.0	31.3	21.7
NasDem	9.0	63.6	24.2	12.1
PKS	8.2	38.5	43.1	18.5
PPP	4.5	58.3	25.0	16.7
PAN	6.8	21.4	50.0	28.6
Demokrat	7.8	50.7	31.3	17.9
Lainnya	9.7	26.3	52.2	21.5

	BASE	Oleh anggota DPR	Oleh partai politik	TT/TJ
KEPUASAN ATAS KINERJA PRESIDEN				
Puas	62.9	47.6	26.9	25.5
Kurang puas	35.6	43.8	31.3	24.8
TT/TJ	1.4	30.1	0.0	69.9

Pemilih di hampir semua partai merasa lebih diwakili oleh anggota DPR dibanding partai politik

PENGALAMAN PEMILU SERENTAK 2019 MENURUT BASIS PARTAI

Apakah Ibu/Bapak tahu bahwa pada pemilihan umum serentak 2019, memilih presiden dan juga memilih anggota DPR, banyak petugas pemilihan umum meninggal dunia karena beban kerja yang berat? ... (%)

Bila **ya**, apakah itu bisa dimaklumi atau tidak bisa dimaklumi? ... (%)

Bila **tidak bisa dimaklumi**, apakah sebaiknya pemilihan umum dan pemilihan presiden serentak itu dihindari? ... (%)

	BASE	Ya	Tidak	Ya, bisa dimaklumi	Tidak bisa dimaklumi	TT/TJ	Ya, sebaiknya dihindari	Tidak perlu	TT/TJ
BASIS PARTAI 2019									
PKB	9.7	68.1	31.9	40.6	59.4	0.0	89.5	10.5	0.0
Gerindra	12.6	73.4	26.6	30.9	69.1	0.0	63.1	32.0	4.9
PDIP	19.3	69.0	31.0	49.8	49.8	.4	72.1	25.4	2.5
Golkar	12.3	77.1	22.9	39.1	60.9	0.0	82.1	15.4	2.6
NasDem	9.0	75.8	24.2	44.0	52.0	4.0	76.9	23.1	0.0
PKS	8.2	64.6	35.4	33.3	66.7	0.0	64.3	28.6	7.1
PPP	4.5	75.0	25.0	55.6	44.4	0.0	75.0	25.0	0.0
PAN	6.8	71.4	28.6	40.0	60.0	0.0	50.0	50.0	0.0
Demokrat	7.8	70.1	29.9	36.2	61.7	2.1	69.0	31.0	0.0
Lainnya	9.7	60.1	39.9	84.8	15.2	0.0	100.0	0.0	0.0
KEPUASAN ATAS KINERJA PRESIDEN									
Puas	62.9	67.9	32.1	42.8	56.5	.7	74.4	23.4	2.1
Kurang puas	35.6	69.8	30.2	33.2	66.4	.4	68.4	23.9	7.7
TT/TJ	1.4	54.0	46.0	59.2	40.8	0.0	44.8	55.2	0.0

Pemilih di hampir semua partai umumnya berpandangan bahwa banyaknya korban dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019 tak bisa ditoleransi, dan pemilu serentak itu harus dihindari.

Demikian juga umumnya warga yang menilai positif maupun negatif terhadap kinerja presiden.

PILEG & PILPRES SERENTAK VS TIDAK SERENTAK MENURUT BASIS PARTAI

Pendapat pertama: Pemilihan anggota DPR dan pemilihan presiden dilakukan pada waktu bersamaan, baik tanggal, bulan maupun tahun

Pendapat kedua: Pemilihan anggota DPR dan pemilihan presiden dilakukan pada waktu berbeda tapi pada tahun yang sama

	BASE	Pendapat pertama	Pendapat kedua	TT/TJ
BASIS PARTAI 2019				
PKB	9.7	38.3	55.3	6.4
Gerindra	12.6	37.9	57.1	4.9
PDIP	19.3	35.5	54.6	9.9
Golkar	12.3	43.4	50.6	6.0
NasDem	9.0	51.5	48.5	0.0
PKS	8.2	29.2	63.1	7.7
PPP	4.5	50.0	50.0	0.0
PAN	6.8	28.6	57.1	14.3
Demokrat	7.8	41.8	58.2	0.0
Lainnya	9.7	19.5	71.3	9.2

	BASE	Pendapat pertama	Pendapat kedua	TT/TJ
KEPUASAN ATAS KINERJA PRESIDEN				
Puas	62.9	37.8	53.0	9.2
Kurang puas	35.6	33.8	57.8	8.5
TT/TJ	1.4	24.1	27.1	48.8

Mayoritas pemilih partai manapun secara umum menolak Pileg dan Pilpres serentak, demikian juga warga yang puas ataupun tidak puas dengan kinerja presiden

PILEG, PILPRES & PILKADA SERENTAK VS TIDAK SERENTAK MENURUT BASIS PARTAI

Pendapat pertama: Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang akan datang dilakukan bersamaan waktunya dengan pemilihan anggota DPR dan pemilihan presiden

Pendapat kedua: Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan berbeda waktunya dengan pemilihan anggota DPR dan pemilihan presiden

	BASE	Pendapat pertama	Pendapat kedua	TT/TJ
BASIS PARTAI 2019				
PKB	9.7	29.8	66.0	4.3
Gerindra	12.6	27.6	69.0	3.4
PDIP	19.3	28.5	64.5	7.0
Golkar	12.3	26.5	68.7	4.8
NasDem	9.0	45.5	54.5	0.0
PKS	8.2	18.5	73.8	7.7
PPP	4.5	16.7	83.3	0.0
PAN	6.8	35.7	50.0	14.3
Demokrat	7.8	37.3	61.2	1.5
Lainnya	9.7	43.0	57.0	0.0

	BASE	Pendapat pertama	Pendapat kedua	TT/TJ
KEPUASAN ATAS KINERJA PRESIDEN				
Puas	62.9	31.0	60.7	8.3
Kurang puas	35.6	25.5	68.6	5.9
TT/TJ	1.4	23.5	36.1	40.4

Mayoritas pemilih di semua partai menolak Pileg dan Pilpres dilakukan serentak dengan Pilkada pada tahun yang sama. Demikian juga baik warga yang puas ataupun tidak puas dengan kinerja presiden. Ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap Pilkada Serentak 2024 berasal dari mayoritas pemilih lintas partai.

PILKADA 2022 VS PILKADA SERENTAK 2024 MENURUT BASIS PARTAI

Pendapat pertama: Ada sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota akan habis masa tugasnya pada tahun 2022 dan karena itu pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota di daerah tersebut harus dilakukan sebelum masa tugas mereka berakhir pada tahun yang sama

Pendapat kedua: Ada sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota akan habis masa tugasnya pada tahun 2022 dan pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota di daerah tersebut harus dilakukan pada 2024 bersamaan dengan pemilihan anggota DPR dan pemilihan presiden. Untuk sementara gubernur, bupati, atau wali kota ditunjuk oleh pemerintah pusat, bukan dipilih rakyat langsung

	BASE	Pendapat pertama	Pendapat kedua	TT/TJ
BASIS PARTAI 2019				
PKB	9.7	63.8	29.8	6.4
Gerindra	12.6	55.7	38.4	5.9
PDIP	19.3	56.1	29.6	14.4
Golkar	12.3	61.4	28.9	9.6
NasDem	9.0	63.6	30.3	6.1
PKS	8.2	61.5	29.2	9.2
PPP	4.5	58.3	41.7	0.0
PAN	6.8	71.4	7.1	21.4
Demokrat	7.8	59.7	35.8	4.5
Lainnya	9.7	22.3	60.6	17.1

	BASE	Pendapat pertama	Pendapat kedua	TT/TJ
KEPUASAN ATAS KINERJA PRESIDEN				
Puas	62.9	53.6	31.8	14.6
Kurang puas	35.6	57.9	31.9	10.3
TT/TJ	1.4	34.7	9.9	55.4

Mayoritas pemilih semua partai ingin ada Pilkada 2022. Demikian juga yang puas maupun tidak puas dengan kinerja presiden.

PILKADA 2023 VS PILKADA SERENTAK 2024 MENURUT BASIS PARTAI

Pendapat pertama: Ada sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota akan habis masa tugasnya pada tahun 2023 dan karena itu pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota di daerah tersebut harus dilakukan sebelum masa tugas mereka berakhir pada tahun yang sama

Pendapat kedua: Ada sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota akan habis masa tugasnya pada tahun 2023 dan pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota di daerah tersebut harus dilakukan pada 2024 bersamaan dengan pemilihan anggota DPR dan pemilihan presiden. Untuk sementara gubernur, bupati, atau wali kota ditunjuk oleh pemerintah pusat, bukan dipilih rakyat langsung

	BASE	Pendapat pertama	Pendapat kedua	TT/TJ
BASIS PARTAI 2019				
PKB	9.7	72.3	21.3	6.4
Gerindra	12.6	52.7	41.4	5.9
PDIP	19.3	54.6	31.0	14.4
Golkar	12.3	61.4	27.7	10.8
NasDem	9.0	60.6	30.3	9.1
PKS	8.2	63.1	29.2	7.7
PPP	4.5	66.7	33.3	0.0
PAN	6.8	64.3	21.4	14.3
Demokrat	7.8	59.7	34.3	6.0
Lainnya	9.7	43.8	39.1	17.1

	BASE	Pendapat pertama	Pendapat kedua	TT/TJ
KEPUASAN ATAS KINERJA PRESIDEN				
Puas	62.9	52.2	33.2	14.6
Kurang puas	35.6	57.0	31.8	11.2
TT/TJ	1.4	34.7	9.9	55.4

Mayoritas pemilih semua partai ingin ada Pilkada 2023. Demikian juga yang puas maupun tidak puas dengan kinerja presiden.

PILPRES 2 PASANGAN VS LEBIH DARI 2 PASANGAN MENURUT BASIS PARTAI

Pendapat pertama: Pasangan calon presiden-wakil presiden sebaiknya dua pasang saja supaya lebih sederhana

Pendapat kedua: Pasangan calon presiden-wakil presiden sebaiknya lebih dari dua pasang untuk menjaring secara lebih terbuka putra-putri terbaik menurut pilihan rakyat

	BASE	Pendapat pertama	Pendapat kedua	TT/TJ
BASIS PARTAI 2019				
PKB	9.7	44.7	53.2	2.1
Gerindra	12.6	34.0	63.5	2.5
PDIP	19.3	34.6	59.4	5.9
Golkar	12.3	45.8	49.4	4.8
NasDem	9.0	45.5	54.5	0.0
PKS	8.2	21.5	72.3	6.2
PPP	4.5	50.0	50.0	0.0
PAN	6.8	42.9	50.0	7.1
Demokrat	7.8	31.3	68.7	0.0
Lainnya	9.7	33.8	66.2	0.0

	BASE	Pendapat pertama	Pendapat kedua	TT/TJ
KEPUASAN ATAS KINERJA PRESIDEN				
Puas	62.9	36.7	57.8	5.5
Kurang puas	35.6	28.1	65.9	6.0
TT/TJ	1.4	26.1	57.1	16.8

Pemilih partai manapun umumnya menginginkan agar pasangan calon presiden lebih dari dua

ANGGOTA KPU DARI PARTAI VS ANGGOTA KPU INDEPENDEN MENURUT BASIS PARTAI

Pendapat pertama: Partai politik sebagai peserta pemilu juga menjadi penyelenggara pemilu sehingga anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah orang-orang dari partai politik

Pendapat kedua: Partai politik tetap sebagai peserta pemilu sedangkan penyelenggara pemilu adalah KPU yang anggotanya adalah orang-orang independen (bukan orang partai) yang dipilih pemerintah dan DPR seperti selama ini

	BASE	Pendapat pertama	Pendapat kedua	TT/TJ
BASIS PARTAI 2019				
PKB	9.7	12.8	78.7	8.5
Gerindra	12.6	9.4	85.7	4.9
PDIP	19.3	12.1	78.3	9.6
Golkar	12.3	16.9	74.7	8.4
NasDem	9.0	12.1	84.8	3.0
PKS	8.2	7.7	86.2	6.2
PPP	4.5	8.3	91.7	0.0
PAN	6.8	14.3	71.4	14.3
Demokrat	7.8	10.4	83.6	6.0
Lainnya	9.7	15.6	58.9	25.5

	BASE	Pendapat pertama	Pendapat kedua	TT/TJ
KEPUASAN ATAS KINERJA PRESIDEN				
Puas	62.9	9.8	80.2	10.0
Kurang puas	35.6	12.0	80.0	8.1
TT/TJ	1.4	0.0	60.0	40.0

Mayoritas pemilih partai manapun menginginkan agar anggota KPU dari independen, bukan orang partai.
Demikian juga warga yang puas atau tidak puas dengan kinerja presiden.

TEMUAN

- Partai punya pandangan berbeda-beda terkait dengan UU pemilihan umum, pemilihan presiden dan Pilkada.
- Ada partai yang cenderung punya pandangan agar presiden dipilih oleh anggota MPR, bukan dipilih oleh rakyat secara langsung. Pandangan ini tak didukung mayoritas pemilih partai manapun, termasuk PDI Perjuangan.
- Pemilih pada umumnya, apapun partai yang dipilihnya, ingin mempertahankan sistem pemilihan anggota DPR dengan sistem proporsional daftar calon terbuka seperti dalam UU yang sekarang, termasuk pada umumnya pemilih PDI Perjuangan.
- Pemilih pada umumnya, partai manapun yang mereka pilih pada pemilu 2019, tidak membenarkan pelaksanaan pemilu 2019 yang banyak menimbulkan korban meninggal maupun sakit karena beban petugas yang berlipat, dan berharap pemilu serentak itu tidak diulang lagi.

TEMUAN

- Berkaca dari pengalaman pemilu serentak 2019 itu pula pemilih partai pada umumnya, apapun partainya, tidak mendukung Pileg, Pilpres, Pilkada serentak pada tahun yang sama 2024. Pemilih PDIP, Gerindra, PKB, Golkar, PPP, dan PAN umumnya menolak keserempakan tersebut.
- Pemilih partai manapun pada pemilu 2019 umumnya menginginkan pasangan calon presiden-wakil presiden lebih dari dua pasang, supaya ada kesempatan lebih terbuka untuk mendapat pasangan yang lebih baik.
- Di samping itu, anggota pemilih partai manapun ingin agar anggota KPU bukan dari partai politik.

KESIMPULAN

KESIMPULAN

- Preferensi publik terhadap demokrasi cukup tinggi (71,9%), namun ada penurunan kinerja demokrasi sebagaimana terlihat dari penurunan kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi dalam setahun terakhir.
- Untuk memperbaiki kinerja demokrasi dalam prakteknya sebagian ditentukan oleh UU pemilu yang mendukung bagi perbaikan kinerja tersebut: Sejauh mana UU itu mencerminkan rasa keterwakilan pemilih di tingkat elite politik? Sejauh mana pandangan dan kebijakan-kebijakan yang diinginkan anggota DPR dan pemerintah mencerminkan keinginan dari pemilih nasional pada umumnya?
- Di DPR pembuatan UU terkait pemilu sangat ditentukan oleh pandangan dan sikap partai politik. Sementara itu partai merupakan lembaga yang paling tidak dipercaya dibanding lembaga-lembaga publik lainnya. Terlalu sedikit warga yang punya ikatan psikologis yang positif dengan partai politik. Setelah partai, DPR dan DPD adalah lembaga yang juga kurang dipercaya publik. Ini merupakan sumber bagi tidak stabil dan tidak baiknya kinerja demokrasi kita.

KESIMPULAN

- Karena tingkat kepercayaan pada partai dan pembuat UU di DPR rendah maka UU yang dibuat harus memperhatikan apa yang publik inginkan. Tidak cukup hanya bersandar pada pertimbangan teknokratik para legislator karena di antara mereka sendiri tidak ada konsensus untuk isu-isu strategis terkait UU pemilihan umum. Dalam situasi perbedaan pandangan elite ini maka pandangan publik nasional menjadi mendesak diperhatikan untuk sejumlah isu dasar dan strategis terkait UU pemilihan umum dan Pilkada.
- Paran legislator harus memperhatikan bahwa:
 1. Ide di sebagian elite politik agar presiden dipilih MPR bertentangan dengan aspirasi hampir semua rakyat Indonesia (90,3%).
 2. Ide agar sistem pemilu dirubah dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup ditentang oleh sebagian besar pemilih nasional (78,2%)
 3. Rakyat umumnya lebih merasa terwakili orang (anggota DPR) (46%) dari pada partai politik (28%). Ini mengindikasikan bahwa hubungan pemilih dengan orang (anggota DPR) lebih kuat daripada dengan partai.

KESIMPULAN

4. Rakyat umumnya tidak bisa memaklumi banyak korban di pihak penyelenggara pemilu serentak 2019 lalu, dan karena itu pemilih umumnya menolak pemilu memilih anggota legislatif dan pemilihan presiden dilakukan serentak (54,3%).
5. Pemilih pada umumnya (63,2%) tidak setuju pemilu, pilpres, dan Pilkada dilakukan serentak dalam tahun yang sama pada 2024
6. Pemilih nasional umumnya (54,8%) ingin ada Pilkada 2022 untuk daerah yang kepala daerah yang berakhir masa tugasnya pada tahun tersebut.
7. Pemilih nasional umumnya (53,7%) ingin ada Pilkada 2023 untuk daerah yang kepala daerahnya berakhir pada tahun tersebut.
8. Pemilih pada umumnya (60,7%) berharap pasangan calon presiden lebih dari dua pasang untuk memperbesar peluang rekrutmen pemimpin nasional lebih baik. Karena itu *threshold* sebagai syarat pencalonan untuk menjadi calon presiden oleh partai harus dibuat sesuai dengan tujuan tersebut.
9. Publik umumnya (79,8%) tidak setuju anggota KPU sebagai penyelenggara Pemilu berasal dari partai politik.

KESIMPULAN

- Sembilan sikap pemilih nasional tersebut di dukung oleh mayoritas pemilih di semua partai, baik di partai-partai koalisi pendukung pemerintah maupun partai-partai di luar koalisi tersebut. Artinya semua sikap itu tidak partisan, melainkan multipartisan.
- Kesembilan sikap pemilih itu didukung baik oleh pemilih yang merasa puas ataupun tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Ini mengindikasikan bahwa sikap itu tidak dipengaruhi oleh dukungan atau penolakan terhadap presiden Jokowi.
- Dalam kondisi hubungan psikologis antara pemilih dan partai tidak erat, dan dalam keadaan tingkat kepercayaan pada partai rendah, UU pemilu harus memperhatikan unsur orang (anggota DPR atau presiden) bukan institusi (partai) untuk memperkuat keterwakilan rakyat di politik nasional. Bila tidak demikian, rakyat akan merasa tidak diwakili.
- Sumber ketidakpercayaan publik pada partai akibat dari kinerja masing-masing partai, terutama lemahnya demokrasi di hampir semua internal partai politik.

TERIMA KASIH



Jl. Cisadane No. 8, Menteng – Jakarta Pusat

Telp: (021) 31927996/98, Fax: (021) 3143867

Website: www.indikator.co.id